

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Abintoro Prakoso. 2022. *Filsafat Hukum*. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Arfa'I. 2022. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Dahlai Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Farid Wajdi dan Andryan. 2022. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2023. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Barat. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- M. Hajon, Philipus dan Tatiek Sri Jatmiati. 2022. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Prees.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

S.F Marbun. 2015. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admministratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sirajuddin et. All. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.

Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

_____. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Maha Karya Pustaka.

Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintahan: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

D. Jurnal

Ahmad Yani, “Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

Belinda Putri Herawati, Yohanes Suwanto, “Pembentukan Peraturann Perundang-Undangan yang Baik Bagi Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan* 2019 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022.

Dewi Suci Rahmadhani dan Winarno Budyatmojo, “Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022.

Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018.

- Fikhri andhito Putra dan Haniah Hanafie, “Modal sosial dalam pemilihan kepala desa (pilkades)”, *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Volume 2 No.2 Oktobe 2021.
- Firman, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa”, *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1*, Mei 2020.
- Herawati, Belinda Putri dan Yohanes Suwanto, “Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang Baik Bagi Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 2, Year 2022.
- HM. Thalbah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum no. 3 Vol*, 16 Juli 2009.
- Jorawati Simarmata,” Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terlkait.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2015.
- Kurniawan, “Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun No. 61, Th. XV*, Desember, 2013.
- Naimun, Joko Mardiyanto, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Bedah Hukum, Vol.2, No.1 Edisi*, April 2018.
- Muhammad Ali, Elidar Sari dan Yusriza, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desaoleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1*, April 2023.
- Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Muhammadiyah Law Review 2 (2) Edisi*, Juli 2018.
- Mutia Jawaz Muslim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata”, *Jurnal Fundamental Justice, Volume 1 Nomor 1*, April 2020.

Salmon Bihuku, “Urusan pemerintahan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018.

Sergio Dotulong,” Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI No. 4, Sept-Des 2018.

Siti Muslikhatul Ummah et. All., “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi”, *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 3 Tahun 2023.

Soehartono, “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.2, Mei – Agustus 2012.

Suparno, Abdul Jalil, “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia”, *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Volume: 5 E-ISSN: 2655-1942 Number: 1, Mei 2022.

Yuniar Kurniawaty, “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- _____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita negara republik indonesia tahun 2014 Nomor 2092)
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor : 6)
- _____, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 32)

F. Tesis

- Andrianus Suleman, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Majelis Penyelesaian Sengketa di Bone Bolango*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2020.
- Gohen, *Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Herman, *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Rahmat Nur, "Pengaturan Prinsip Demokrasi Dalam Pengangkatan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020.

G. Website/Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diunduh pada tanggal 8 September 2023, pukul 19.42 WIB.

<https://www.google.com/search?q=peraturan+perundangundangan+menurut+ahli&oq=peraturan+perundang-undangan+menurut+ahli>, diunduh pada tanggal 14 September 2023, pukul 8.42. WIB.

<https://www.google.com/search?q=pengaturan+menurut+e.+utrech>, diunduh pada tanggal 16 September 2023, pukul 13.48 WIB.

<https://www.google.com/search?q=pengaturan+menurut+e.+utrech>, diunduh pada tanggal 16 September 2023, pukul 13.48 WIB.

<https://www.google.com/search?q=pengaturan+menurut+ahli+M.H+Tirtaamidj> ata, diunduh pada tanggal 16 September 2023, pukul 13.55 WIB.

https://www.google.com/search?q=teori+kepastian+hukum+jan+michiel+otto&oq=teori+kep&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYJxg7GIAEGIoFMg4IABBFGCcYOxiABBiKBTIOCAEQRRgnGDsYgAQYigUyBggCEEUYOTIHCAMQABiABDIMCAQQABgUGIcCGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGI8C0gEJNTAxM2owajE1qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diunduh pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 08.34 WIB.